Hari Pertama Berkantor, Anggota DPRD Bombana dan Pendemo Teken Kesepakatan

Rumbia, SultraNET. | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana yang baru saja dilantik untuk Periode 2019-2024 nampaknya menjadi harapan besar masyarakat daerah itu untuk menyuarakan aspirasi terhadap berbagai persoalan yang ada.

Hal itu nampak jelas bahkan sejak hari pelantikan anggota DPRD tanggal 01 Oktober 2019 kemarin, para wakil rakyat itu sudah didatangi ratusan massa yang melakukan aksi menuntut perbaikan berbagai ruas jalan yang ada di Kabupaten Bombana khususnya yang ada dipulau di Kabaena yang dinilai kerusakannya sudah sangat parah.

Rupanya Aksi dari berbagai elemen masyarakat Bombana itu kembali hadir dihari Pertama ke 25 Anggota DPRD itu Masuk Kantor, Rabu (02/10/2019).

Berbagai elemen masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa, Pemuda dan Lembaga Swadaya Masyarakat (AMP-LSM) itu meminta anggota DPRD yang baru saja dilantik untuk segera fokus menyelesaikan permasalahan yang fital dirasakan masyarakat Bombana saat ini.

Asri salah satu peserta aksi menyebut permasalahan mendasar yang dihadapi bombana saat ini, yang harus segera disuarakan Anggota DPRD Baru yaitu terkait infrastruktur berbagai ruas jalan di seluruh Kecamatan di Bombana yang tidak memadai, mengkaji efektifitas dan transparansi penerapan program gembira cerdas, gembira sehat dan beberapa program pemberdayaan maupun program lain yang digagas Pemkab Bombana, karena realisasi dari program tersebut dinilai sarat kepentingan dan dianggap tidak tepat sasaran.

> ***“ gembira cerdas yang seharusnya diperuntukkan untuk para mahasiswa yang belum sarjana, atau mereka yang masih berada dibawah garis kemiskinan, ini aneh kalau ada sarjana yang menggunakan Gembira Cerdas,” ujarnya.***

Salah satu peserta aksi Rezki menambahkan bahwa pendidikan khususnya di Kabupaten Bombana tidak seindah yang dipaparkan di media, seharusnya Pemkab Bombana turun langsung melihat kondisi sekolah-sekolah yang ada di pelosok desa.

> ***“Kasihan kami lihat SD yang ada di pulau masudu sana, siswanya kurang lebih 100 orang dan hanya punya dua guru saja, itupun PHTT dan mereka suami istri, miris,” ucap Rizky***

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD terpilih Arsyad mengakui, bahwa program Gembira Cerdas untuk mahasiswa, bukan untuk sarjana. Regulasinya jelas dalam Perbup dan standar nilai perestasi dengan nilai IP tiga koma nol.

> ***“Kalau memang betul-betul ada sarjana yang terima Gembira Cerdas, kirim ke saya namanya dan saya akan tindak lanjuti ke Pansel,” tegas Arsyad.***

Arsyad juga meminta, diberi ruang agar membentuk terlebih dahulu alat kelengkapan dewan dan membuat rencana kerja.

> ***“Beri kami dulu ruang untuk membentuk alat kelengkapan, andaikan masih banyak saran-sarannya adik-adik itu, kami akan lebih senang dan akan membuat rencana kerja,” ucap Arsyad.***

Sebelum membubarkan diri salah satu peserta aksi, Zainal yang juga Ketua Hippamor meminta agar massa dari AMP-LSM dan seluruh anggota legislatif di ruang rapat untuk komitmen menandatangani poin persetujuan tuntutan massa untuk ditindaklanjut dan disetujui oleh semua peserta rapat yang langsung menandatangani poin yang diajukan tersebut.

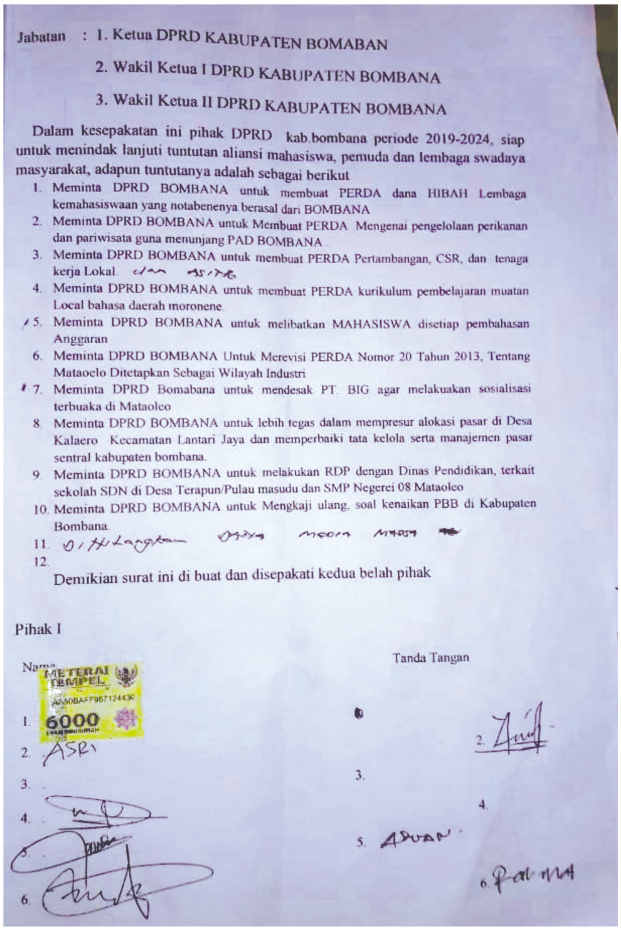

Jabatan : 1. Ketua DPRD KABUPATEN BOMABAN

2. Wakil Ketua I DPRD KABUPATEN BOMBANA

3. Wakil Ketua II DPRD KABUPATEN BOMBANA

Dalam kesepakatan ini pihak DPRD kab.bombana periode 2019-2024, siap untuk menindak lanjuti tuntutan aliansi mahasiswa, pemuda dan lembaga swadaya masyarakat, adapun tuntutanya adalah sebagai berikut

1. Meminta DPRD BOMBANA untuk membuat PERDA dana HIBAH Lembaga kemahasiswaan yang notabenenya berasal dari BOMBANA
2. Meminta DPRD BOMBANA untuk Membuat PERDA Mengenai pengelolaan perikanan dan pariwisata guna menunjang PAD BOMBANA
3. Meminta DPRD BOMBANA untuk membuat PERDA Pertambangan, CSR, dan tenaga kerja Lokal.
4. Meminta DPRD BOMBANA untuk membuat PERDA kurikulum pembelajaran muatan Local bahasa daerah moronene.
5. Meminta DPRD BOMBANA untuk melibatkan MAHASISWA disetiap pembahasan Anggaran
6. Meminta DPRD BOMBANA Untuk Merevisi PERDA Nomor 20 Tahun 2013, Tentang Mataoclo Ditetapkan Sebagai Wilayah Industri
7. Meminta DPRD Bomabana untuk mendesak PT. BIG agar melakuakan sosialisasi terbuaka di Mataoleo
8. Meminta DPRD BOMBANA untuk lebih tegas dalam mempresur alokasi pasar di Desa Kalaero Kecamatan Lantari Jaya dan memperbaiki tata kelola serta manajemen pasar sentral kabupaten bombana.
9. Meminta DPRD BOMBANA untuk melakukan RDP dengan Dinas Pendidikan, terkait sekolah SDN di Desa Terapun/Pulau masudu dan SMP Negeri 08 Mataoleo
10. Meminta DPRD BOMBANA untuk Mengkaji ulang, soal kenaikan PBB di Kabupaten Bombana.
11.
12.

Demikian surat ini di buat dan disepakati kedua belah pihak

Pihak I

Nama Tanda Tangan

1. 6000
2. ASRI
3.
4.
5.
6.

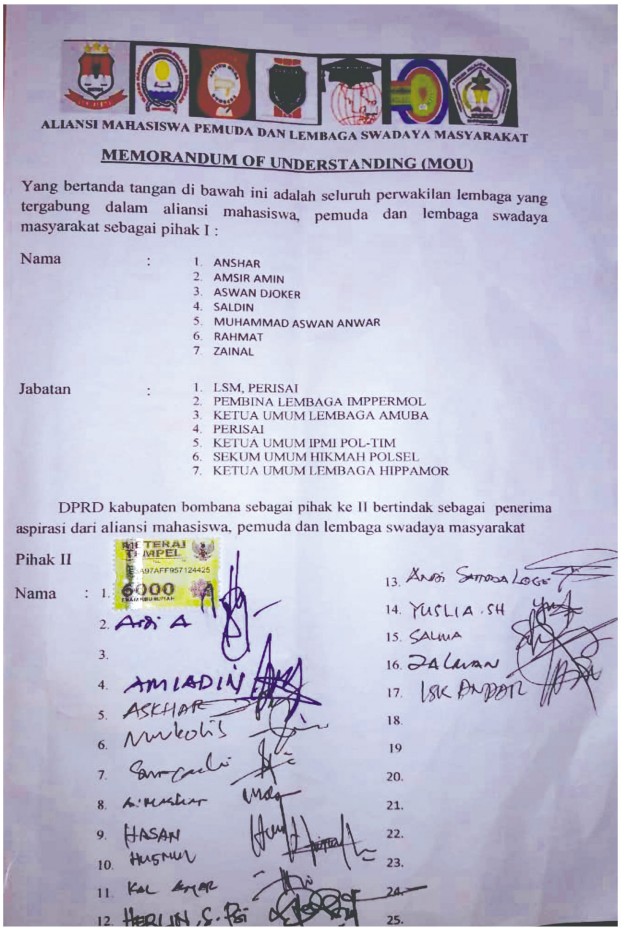

ALIANSI MAHASISWA PEMUDA DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah seluruh perwakilan lembaga yang tergabung dalam aliansi mahasiswa, pemuda dan lembaga swadaya masyarakat sebagai pihak I :

Nama :
1. ANSHAR
2. AMSIR AMIN
3. ASWAN DJOKER
4. SALDIN
5. MUHAMMAD ASWAN ANWAR
6. RAHMAT
7. ZAINAL

Jabatan :
1. LSM, PERISAI
2. PEMBINA LEMBAGA IMPPERMOL
3. KETUA UMUM LEMBAGA AMUBA
4. PERISAI
5. KETUA UMUM IPMI POL-TIM
6. SEKUM UMUM HIKMAH POLSEL
7. KETUA UMUM LEMBAGA HIPPAMOR

DPRD kabupaten bombana sebagai pihak ke II bertindak sebagai penerima aspirasi dari aliansi mahasiswa, pemuda dan lembaga swadaya masyarakat

Pihak II

Nama :
1. 6000
2. ANDI A
3.
4. AMIADIN
5. ASKHAR
6.
7.
8.
9. HASAN
10. HUSNUL
11.
12.
13.
14. YUSLIA, SH
15. SALMA
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

MOU kesepakatan antara Peserta Aksi dan Anggota DPRD Baru

Pewarta : Efendi